

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA AIR LIKI
KECAMATAN TABIR BARAT KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**Yandra Hartomi
NPM : 198010021**

**Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik
Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung**

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh adanya masalah terkait dengan kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Air Liki yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaan yang belum mampu mengadaptasi pelaksanaan kebijakan, tata kelola kebijakan dana desa yang belum efektif, aspek pengawasan yang masih belum optimal, dan aspek sumber daya aparatur yang belum sepenuhnya mampu menterjemahkan kebijakan dana desa secara optimal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Huberman dan Miles.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan unsur Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*) yang belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Adapun unsur yang paling menghambat dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki adalah faktor sumber daya aparatur, sistem pengawasan yang belum efektif, dan tata kelola keuangan desa yang belum optimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, pengawasan, tata Kelola pemerintahan

ABSTRACT

This research is based on the existence of problems related to the village fund management policy in Air Liki Village, which has not been fully implemented effectively. This can be seen from the institutions that have not been able to adapt the policy implementation, the governance of the village fund policy that has not been effective, the aspects of supervision that are still not optimal, and the aspects of apparatus resources that have not been able to fully translate the village fund policy optimally. Therefore, the purpose of this research is directed to describe and analyze how the implementation of the village fund policy in Air Liki Village, West Tabir District, Merangin Regency. The research method used is descriptive through a qualitative approach. Meanwhile, data analysis uses an interactive analysis model from Huberman and Miles.

The results showed that the implementation of the Village Fund Policy in Air Liki Village, West Tabir District, Merangin Regency has not been effective. This is due to the elements of Policy Content (Content of Policy) and Policy Environment (Context of Policy) which have not fully supported the implementation of the Village Fund in Air Liki Village, West Tabir District, Merangin Regency. The most inhibiting elements in the implementation of the Village Fund policy in Air Liki Village are the apparatus resources factor, the ineffective supervision system, and the suboptimal village financial governance.

Keywords: Policy Implementation, supervision, governance

ABSTRAK

Ieu panalungtikan didasaran ku pasualan-pasualan anu patali jeung kawijakan pengelolaan dana désa di Désa Air Liki anu tacan dilaksanakeun sacara éféktif. Hal éta bisa katitén tina lembaga anu can mampu nyaluyukeun palaksanaan kawijakan, tata kelola kawijakan dana désa anu tacan éféktif, aspék pangawasan anu masih kénéh tacan optimal, jeung aspék sumberdaya aparatur anu can maksimal. mampu narjamahkeun kawijakan dana desa sacara optimal. Ku kituna, tujuan dina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun jeung nganalisis kumaha kawijakan dana désa dilaksanakeun di Désa Air Liki Kacamatan Tabir Barat Kabupatén Merangin. Méthode panalungtikan anu digunakeun nya éta déskriptif ngaliwatan pamarekan kualitatif. Sedengkeun analisis data ngagunakeun modél analisis interaktif ti Huberman jeung Miles.

Hasilna némbongkeun yén palaksanaan Kabijakan Dana Désa di Désa Air Liki Kacamatan Tabir Barat Kabupatén Merangin tacan éféktif. Hal ieu dilantarankeun ku unsur-unsur Isi Kabijakan jeung Konteks Kabijakan anu can sapinuhna ngarojong kana palaksanaan Dana Désa di Désa Air Liki Kacamatan Tabir Barat Kabupatén Merangin. Unsur-unsur anu paling ngahalangan palaksanaan kawijakan Dana Désa di Désa Air Liki nya éta faktor sumber daya aparatur, sistem pangawasan nu teu éféktif, jeung pengelolaan keuangan désa anu can maksimal.

Kata Kunci: Palaksanaan kawijakan, pangawasan, tata kelola

I. Pendahuluan

Di Indonesia, istilah pembangunan desa acapkali dimaknai sama dengan istilah pembangunan masyarakat desa. Dalam konteks tersebut, ada yang mengatakan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif. Pada sisi lain, pembangunan masyarakat desa juga dimaknai sebagai suatu proses dimana warga desa bersama pejabat-pejabat pemerintahan berusaha memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara substantif, pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu .

Pasca era deregulasi di tahun 1985, Orde Baru terus mengeluarkan program-program pembangunan yang difokuskan ke penduduk pedesaan, baik petani maupun nelayan. Diantara program tersebut adalah Program Pengembangan Kawasan Terpadu , Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil , Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB , Inpres Desa Tertinggal, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal , Usaha Ekonomi Pedesaan Simpan Pinjam , dan lain sebagainya. Meskipun program-program ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, karakternya yang teknokratik, sentralistik, top-down menyebabkan derajat keberlanjutannya sangat lemah karena menempatkan negara sebagai aktor utama pembangunan dan

secara bersamaan memarginalkan warga desa dari tata kelola pemerintahan desa dan berpotensi melahirkan kultur pengemis dikalangan masyarakat desa.

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Gaung reformasi yang berhembus secara nasional tak pelak membawa tuntutan perubahan dan pembaharuan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih akuntabel, responsif, dan absah. Tuntutan demokratisasi yang melanda pedesaan telah menjelma menjadi kekuatan baru untuk melawan prakti-praktik otoritarianisme dan dominasi yang dilakukan oleh elite desa. dalam konteks inilah, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai jawaban atas tuntutan otonomi daerah, mengakhiri sentralisasi dan secara nyata mengakui otonomi desa. (Lia Muliawaty, 2019)

Ketika program ini memiliki ruh yang sama, yakni menempatkan warga desa sebagai aktor utama proses pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proram. Ketiga program ini bertumpu pada prinsip pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi masyarakat, prioritas kolaborasi dan berkelanjutan, transparansi akuntabilitas, kesetaraan gender, dan demokratisasi.

Di akhir jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai kata sepakat dengan DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Esensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan «angin segar» terhadap pemerintah desa, dimana pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang

berupa relokasi anggaran pusat berbasis desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pada 2015, jumlah dana desa mencapai Rp.20,17 triliun atau mengalami peningkatan Rp. 11 triliun jika dibandingkan dengan periode akhir masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 9 triliun untuk pembangunan desa. Pada 2016, dana desa naik lebih dari dua kali lipat dari periode sebelumnya, yakni mencapai angka Rp 46,9 triliun dan pada 2017 sebesar Rp. 60 triliun. Selama tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo, dana desa yang disalurkan berjumlah Rp 120 triliun. Pada 2018, jumlah dana desa rencananya meningkat menjadi Rp.120 triliun. Ibu kota kabupaten Merangin berada di kecamatan Bangko. Kabupaten Merangin juga termasuk salah satu kabupaten tertua di provinsi Jambi setelah Kabupaten Batanghari. Kemudian salah satu desa yang cukup menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

Desa Air Liki sudah ada sejak ratusan tahun lalu, alamnya memang berbukit-bukit, tentunya ini memerlukan kerja keras dan biaya yang cukup besar untuk membangun jalan ke desa paling terpencil ini. Memang tidak dipungkiri, bahwa desa ini memiliki kondisi alam yang cukup indah, namun kondisi infrastruktur dan fasilitas yang ada secara umum dinilai belum menunjang terhadap pembangunan dan kemajuan sebuah desa.

Air Liki adalah salah satu desa di kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, Indonesia. Untuk mencapai Desa Tersebut kita harus melalui transportasi Air, dari Desa Ngaol sekitar 4 jam perjalanan. Desa Air Liki Merupakan Salah Satu Desa yang terisolir di Kabupaten Merangin, bahkan disebut sebagai desa yang paling terisolir di

Provinsi Jambi. Kondisinya sangat memprihatikan, karena tidak ada akses transportasi yang menghubungkan antara wilayah, serta aliran listrik yang juga tidak terhubung dengan wilayah lain. Selain itu, saluran komunikasi juga tersedia secara memadai, sehingga menempatkan desa ini kurang terjangkau oleh teknologi komunikasi yang memadai.

Hasil survey awal yang dilakukan pada Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi mengindikasikan adanya beberapa persoalan yang cukup serius terkait dengan kebijakan penggunaan dana desa tersebut, baik terkait dengan aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan aspek sumber daya manusia yang pada gilirannya menimbulkan kesangsian publik terhadap implementasi kebijakan dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, ditemukan fakta bahwa formula penentuan jumlah dana desa yang akan diterima oleh pemerintah desa nampaknya kurang tepat sasaran dan kurang mendukung terhadap tujuan undang-undang desa, yaitu pemerataan pembangunan dan akses masyarakat miskin terhadap layanan publik. Formula perhitungan besaran dana desa yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis telah menyebabkan adanya rasa ketidak-adilan dan berkontribusi pada peningkatan ketimpangan mengingat keberagaman desa yang sangat besar antar daerah bahkan di dalam suatu wilayah provinsi.

II. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian di atas, maka focus penelitian ini diarahkan pada Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang secara konseptual akan diukur berdasarkan

teori Implementasi Kebijakan dari Grindle dalam Satibi (2019) yang esensinya menyangkut Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi Kebijakan (Context of Implementation). Sesuai dengan focus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian “Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?”

III. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus dan perumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

IV. Kerangka Berpikir

Implementasi Kebijakan sebagaimana dilukiskan oleh Grindle dalam Satibi (2019) merupakan suatu pelaksanaan kebijakan publik yang dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Lebih lanjut, Grindle dalam Satibi (2019) mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) faktor sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (desigen) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu :
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok;

- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam Satibi (2019) juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri atas :

- 1 . Isi Kebijakan (Content of Policy), yang mencakup :

- a. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, dan hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Pada poin ini Content of Policy berupaya untuk menunjukkan atau bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of Policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

- d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program Implementer (Pelaksana Program)

Suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabilitas demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. Resources Committed (Sumber Daya yang Digunakan)

Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), yang mencakup sebagai berikut :

a. Power, Interes, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

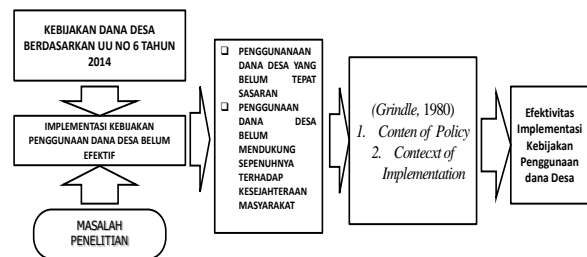
b . Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan Rezim yang sedang berkuasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dari Pelaksana). Hal lain yang menjadi penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan

pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Parameter implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Grindle di atas, menurut hemat penulis cukup komprehensif dalam mengungkap peta masalah yang menjadi focus kajian. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian implementasi kebijakan dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, teori yang dikemukakan oleh Grindle dalam Satibi (2019) tersebut penulis jadikan sebagai instrument atau pisau analisis dalam penelitian tersebut. Adapun kerangka berfikir penelitian yang akan menjadi acuan, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1
Kerangka Berfikir Penelitian

VI. Pembahasan

Maksud dari digunakannya metode deskriptif ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, dalam hal ini

implementasi kebijakan dana desa. Melalui metode ini diharapkan dapat ditemukan berbagai permasalahan penting terkait dengan kebijakan dana desa, khususnya dalam implementasinya di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Oleh karena menggunakan design kualitatif, maka tahapan penelitian mencakup langkah-langkah sebagai berikut (Satori dan Komariah, 2014:82-83).

1. Pemilihan topik kajian, dimana hal ini dilakukan dengan mengkaji paradigma dan fenomena empirik menetapkan fokus inquiri, menentukan unit analisis/kategori, serta mengembangkan pertanyaan inquiri.
2. Instrumentasi, yaitu menentukan teknik pengumpulan data, memilih informan dari tiap unit analisis, menyiapkan instrumen berupa pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Pelaksanaan penelitian, meliputi proses perizinan, melakukan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi, serta menyiapkan catatan lapangan.
4. Pengolahan data, yang meliputi langkah reduksi data, display data dan analisis.
5. Hasil penelitian, yang meliputi penarikan kesimpulan, implikasi hasil penelitian, serta menyusun rekomendasi.

Informan Penelitian

Informan atau narasumber penelitian merupakan pihak-pihak atau orang-orang yang diamati dan memberikan data serta informasi berupa kata-kata atau tindakan. Orang-orang tersebut ditetapkan sebagai narasumber karena dianggap kompeten,

mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti, yaitu tentang implementasi kebijakan dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penentuan narasumber dilakukan secara purposive atau menurut tujuan tertentu. Dengan demikian, hanya dipilih narasumber yang memenuhi syarat rich cases, merepresentasikan setting, individu, aktivitas dan menggambarkan heterogenitas karakteristik objek penelitian.

Penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini tidak dilakukan dengan teknik sampling karena hal itu tidak lazim dalam penelitian kualitatif. Setiap subjek adalah narasumber yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu kejadian tertentu. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menyebutnya sebagai narasumber, informan, atau unit analisis. Penentuan narasumber lebih ditekankan pada kualitas narasumber tersebut dari pada kuantitasnya. Mengacu pada pendapat Matra (2003:55), penentuan narasumber didasarkan pada syarat-syarat :

1. Harus meliputi seluruh unsur (tidak satu pun yang tertinggal).
2. Tidak ada unsur yang dihitung dua kali.
3. Harus terkini (up to date).
4. Batas-batasnya harus jelas (siapa saja yang menjadi anggota).
5. Harus dapat dilacak di lapangan.

Selain syarat-syarat tersebut, penentuan narasumber dalam penelitian ini sejalan dengan pendekatan kualitatif menerapkan prosedur berikut ini.

1. Tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kekhususan kasus sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, melainkan dapat berubah pada saat penelitian berlangsung sesuai pemahaman dan kebutuhan yang berkembang selama berlangsungnya penelitian.

3. Tidak diarahkan pada keterwakilan atau merepresentasi, melainkan pada kecocokan konteks siapa dengan jenis informasi apa yang diperlukan.

Sehubungan dengan prosedur di atas, maka narasumber dipilih secara selektif berdasarkan landasan teori yang digunakan serta karakteristik empiris yang dihadapi. Narasumber tidak diarahkan untuk melakukan generalisasi statistik atau sekadar mewakili populasi tetapi lebih pada generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itulah, jumlah narasumber tidak menjadi prioritas.

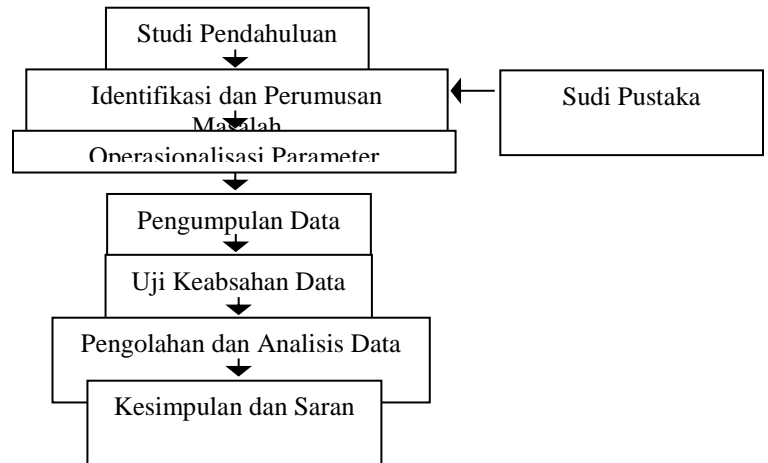
Sesuai dengan konteks masalah, tujuan serta objek penelitian, maka informan atau narasumber yang akan dijadikan sumber informasi adalah:

- a. Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Merangin.
- b. Camat Tabir Barat.
- c. Kepala Desa Air Liki
- d. Kepala BPD Air Liki
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Tokoh Agama

Pemilihan pihak-pihak di atas sebagai narasumber didasarkan pada alasan bahwa pihak-pihak tersebut merupakan para stakeholder implementasi kebijakan Dana Desa. Atas keterlibatannya, para narasumber tersebut dianggap mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa yang berlangsung di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

3.2.4 Prosedur Penelitian

Gambar berikut ini menampilkan prosedur penelitian yang disusun agar diperoleh hasil penelitian yang sistematis.



Gambar 1
Prosedur Penelitian

Langkah-langkah pada Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Studi Pendahuluan, merupakan tahap awal penelitian.

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang akan menjadi sasaran penelitian.

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, masalah yang akan diteliti harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas. Perumusan masalah adalah suatu usaha mengidentifikasi masalah yang terjadi di

dunia nyata secara sistematis berdasarkan teori atau konsep yang ada.

3. Studi Pustaka

Langkah ini dilakukan untuk mencari dan mempelajari teori atau konsep serta penelitian yang relevan. Hasil studi pustaka menjadi dasar acuan bagi pelaksanaan penelitian serta penyelesaian masalah penelitian.

4. Operasionalisasi Parameter Penelitian

Operasionalisasi variabel dilakukan untuk menentukan parameter yang menjadi dasar dalam pengumpulan dan analisis data.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan didasarkan pada suatu pedoman yang disusun berdasarkan operasionalisasi parameter penelitian.

6. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data dilakukan untuk menilai keabsahan data yang dihasilkan dari instrumen penelitian. Langkah uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji credibility atau validitas internal, uji dependability atau reliabilitas, dan uji confirmability atau objektivitas.

7. Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

8. Kesimpulan dan Saran

Langkah terakhir dalam tahapan penelitian ini adalah menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis data. Berdasarkan kesimpulan tersebut,

selanjutnya dapat dikemukakan saran bagi penerapan strategi tertentu sehingga Implementasi Kebijakan Dana Desa dapat berjalan dan mencapai hasil secara efektif.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Secara empiric telah ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan Dana Desa tersebut, tercermin dari hal-hal sebagai berikut: pertama, masih adanya kepentingan yang saling mempengaruhi dari berbagai pihak, baik dari aparat desa, BPD maupun pihak lainnya dalam menterjemahkan kebijakan dana desa, sehingga terjadi tarik-menarik dalam menentukan besaran anggaran untuk program dana desa . Kedua, masih lemahnya pengetahuan dan kompetensi sebagian aparatur desa, sehingga dalam pelaksanaan program dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Ketiga, pemanfaatan dana desa yang kurang tepat sasaran dan kurang mampu memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, perencanaan pembangunan desa yang kurang memperhatikan unsur masyarakat. Artinya, perencanaan yang dibuat cenderung bersifat “top down” dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga penyelenggaraan program dana desa belum sepenuhnya mampu menyentuh pada kepentingan masyarakat. Kelima, lemahnya pengetahuan kapasitas Sebagian besar masyarakat dalam memahami perencanaan program dana desa. Kondisi tersebut, tercermin dari lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

program dana desa. Dalam proses musyawarah dusun, warga cenderung bersifat pasif dan tidak mampu mengeluarkan ide dan gagasan sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Selain itu, ada juga kecenderungan warga desa yang bersifat apatis dan tidak mau berpendapat tentang kegiatan apa yang seharusnya dilakukan karena usulan warga pada akhirnya tidak diakomodir.

VIII. Saran

1. 5.2.1. Saran Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konseptual dalam mengembangkan ilmu administrasi public, khususnya terkait dengan ilmu kebijakan public. Oleh karena itu, kepada peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan implementasi kebijakan dana desa dalam perspektif yang berbeda.

5.2.2. Saran Praktis

Secara praktis peneliti dapat memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, disarankan untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa secara lebih intensif, misalnya melalui Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, khususnya terkait dengan materi kebijakan pengelolaan keuangan desa.
2. Kepada semua pemangku kepentingan terkait dengan program kebijakan dana desa, baik pemerintah desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta stakeholders lainnya untuk melakukan sinergitas kebijakan agar pelaksanaan

program dana desa dapat dilakukan secara lebih terarah dan terencana dengan baik, sehingga dapat lebih memberdayakan masyarakat desa.

3. Kepada Pemerintah Desa Air Liki disarankan untuk memberikan kesempatan yang lebih leluasa kepada masyarakat dalam memberikan masukan, saran dan kritik terkait dengan perencanaan program dana desa yang akan di tetapkan.
4. Kepada Pemerintah Kabupaten Merangin disarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif Kepada Pemerintah Desa, khususnya terkait dengan kebijakan pengelolaan dana desa, agar anggaran yang dikucurkan melalui berbagai program dana desa dapat diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal (2012). Kebijakan Publik. Jakarta. Salemba Humanika.
- Adimihardja dan Harry.2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit: Humaniora Utama Press Bandung:
- Adisasmita, Rahardjo, (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan , Jakarta: Graha Ilmu.
- Agus Wibowo, Gunawan, (2015). Penerbit: PT Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
- Agustino Leo, (2008). Dasar –Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.

- Beratha, I Nyoman (1992). Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta Ghalia. Indonesia . 6 pages
- Budi Winarno (2008). Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta. Fauzi Luthan.
- Chambers, Robert (1995). Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Dye, Thomas R. (1992). Understanding Public Policy (Six Edition). London :Englewood Cliff, Prentice Hall.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press
- Eko, Sutoro (2002). Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bandung: Alfabeta
- Grindle, Merilee S (ed). (1980). Politic and Apolicy Implementation in Third World. New Jersey : Princetown University Press.
- Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan, Cetakan Pertama, Jakarta, ERLANGGA,1983.
- Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar (2001). Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta PT. Pustaka Cidesindo.
- Lia Muliawaty. (2019). PELUANG DAN TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1-11.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung, Indonesia : Alfabeta.
- Mubyarto, M. (1994). Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal. Jogjakarta, Indonesia: Aditya Media & P3PK UGM.
- Prijono, Onny. Pranarka (1996). Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan. Implementasi. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies.
- Putra, Fadillah. (2003). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Raharjo Adisasmita (2006). Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Saefullah A. (2007). Manajemen Perubahan, Bandung: Pustaka Setia.
- Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Jakarta: Gava Media.

- Suradinata, Ermaya. (1998). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Ramadhan.
- Suradi, S. (2005). Perancangan dan Implementasi Modul Kontrol. Bandung, Indonesia : Alfabeta.
- Suryadinata, L. (1998). Indonesia's Political System: Continuity and Change, Contemporary Southeast Asia, 9(4), 268-281.
- Sutrisno, (2005), Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII
- Mas'oed, Mohtar, (2008) "Politik, Birokrasi dan Pembangunan" PUSTAKA PELAJAR , 2008.
- Mardikanto T dan Soebiato P, (2014), Pemberdayaan Masyarakat. Bandung, Alfabeta.
- Mustopadidjaja. (1998). Kebijakan Administrasi Negara, Jakarta : LAN RI.
- Nugroho Dwijowijoto, Riant. (2004). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta : PT. Elek Media Komputindo.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita
- Dokumen Lain :
- Peraturan dan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun
- Permendesa Nomor 4 Tahun 2017) tentang Prioritas penggunaan dana desa